

**SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER
PENDIDIKAN EKONOMI UNIPMA TAHUN 2024
"Transformasi Pendidikan Ekonomi Dalam Membangun Inovasi Model Bisnis
Berkelanjutan Melalui Kolaborasi PT, Sekolah, Dunia Usaha Dan Dunia
Industri"
Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas PGRI Madiun
Madiun, 6 Juli 2024**

98

**Perselisihan Perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa Terhadap Ekspor Nikel,
Minyak Kelapa Sawit, Dan Baja**

Dimas Riyadi Adde Prasetya^{1*}, Lilia Pasca Riani²

^{1,2}*Universitas Negeri Yogyakarta*

e-mail: ^{1*} dimasriyadi.2021@student.uny.ac.id, ^{2*} lilia.pasca.riani@uny.ac.id

Abstrak

Perselisihan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait ekspor nikel, minyak kelapa sawit, dan baja mencerminkan kompleksitas hubungan perdagangan internasional. Uni Eropa memberlakukan kebijakan lingkungan yang ketat, sementara Indonesia melihatnya sebagai proteksionisme. Dampaknya signifikan, mempengaruhi perekonomian dan industri Indonesia. Pemerintah Indonesia merespons dengan kebijakan hilirisasi industri dan diversifikasi pasar ekspor. Alternatif solusi mencakup peningkatan kualitas produk, kolaborasi dengan swasta, penguatan kerjasama regional, dan inovasi produk. Penyelesaian perselisihan ini penting untuk mengurangi dampak negatifnya dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di pasar internasional.

Kata kunci: *Indonesia, Uni Eropa, nikel, minyak kelapa sawit, baja*

Pendahuluan

Di dalam perekonomian suatu negara perdagangan internasional memiliki peranan yang sangat penting. Walau demikian dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi ketegangan perdagangan antara negara-negara yang terlibat dalam aktivitas ekspor dan impor. Salah satu kasus isu yang penting dalam beberapa tahun terakhir adalah perselisihan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang melibatkan ekspor nikel, minyak kelapa sawit, dan baja. Permasalahan ini menarik untuk diobservasi karena dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia sebagai negara eksportir komoditas tersebut.

Masalah ini menjadi penting karena nikel merupakan bahan utama yang digunakan dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik, dan permintaan akan kendaraan listrik tersebut meningkat dengan cepat seiring dengan transisi dunia menuju energi bersih. Nikel di Indonesia diketahui memiliki cadangan yang sangat melimpah, sehingga berpotensi untuk menjadi salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Akan tetapi, Uni Eropa telah mengeluarkan statement yang keras terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah oleh pemerintah Indonesia dengan alasan bahwa kebijakan ini dianggap

melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menyulitkan hilirisasi industri dalam negeri.

Selain nikel, minyak kelapa sawit juga menjadi sumber perselisihan yang krusial. Minyak kelapa sawit adalah komoditas andalan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 20 miliar USD per tahun. Namun, Uni Eropa memberlakukan berbagai kebijakan yang dianggap menghambat ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, dengan alasan utama adalah isu lingkungan dan deforestasi. Sebagai tanggapan, Indonesia melihat kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme yang tidak adil dan telah membawa masalah ini ke forum WTO. Dampak dari perselisihan ini tidak hanya mempengaruhi sektor pertanian tetapi juga menyentuh aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Di sisi lain, industri baja juga mengalami gesekan serupa. Uni Eropa menerapkan bea masuk anti-dumping pada produk baja tahan karat asal Indonesia. Kebijakan ini dianggap merugikan produsen baja Indonesia dan mengurangi daya saing produk mereka di pasar internasional. Perselisihan ini penting untuk diobservasi karena baja merupakan komponen penting dalam pembangunan infrastruktur dan industri manufaktur yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia. Dengan adanya hambatan perdagangan ini, pertumbuhan sektor industri baja di Indonesia bisa terhambat, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Dalam menghadapi permasalahan perdagangan internasional ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Diantaranya adalah menerapkan kebijakan substitusi impor, mendiversifikasi pasar ekspor, serta meningkatkan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan negara-negara terkait. Pemerintah juga berupaya memperkuat daya saing industri dalam negeri melalui pengembangan infrastruktur dan insentif investasi. Perselisihan ini menjadi sangat penting bagi perekonomian Indonesia mengingat kontribusi signifikan dari ekspor komoditas tersebut terhadap pendapatan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk menghimpun, menganalisis, dan merangkum informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan adalah berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah dan artikel penelitian yang berkaitan dengan sengketa perselisihan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa.

Data akan dikumpulkan dengan melakukan pencarian literatur secara sistematis menggunakan database online seperti Google Scholar, JSTOR dan ScienceDirect, termasuk juga sumber-sumber lainnya. Setelah data terkumpul akan dilakukan analisis yang kritis dengan menggunakan metode analisis observasi. Proses analisis melibatkan telaah mendalam literatur guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai topik penelitian, menemukan informasi yang relevan, mengorganisir dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema tertentu, serta menyusun laporan hasil analisis dengan format yang terstruktur.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional melibatkan pertukaran atau perdagangan barang dan jasa antara negara-negara yang berbeda, perdagangan internasional melibatkan penjual luar negeri yang menjual barang ke negara lain dan pembeli luar negeri yang membeli barang dari negara lain (Nuri Aslami, 2022). Melalui perdagangan ini, barang-produk dapat didistribusikan dari satu negara ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai wilayah dunia.

Menurut Aprita, (2020) perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan secara sukarela oleh setiap negara yang terlibat. Tujuan di balik perdagangan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut, yang disebut juga sebagai gains off trade. Perdagangan antar negara adalah proses pertukaran barang dan jasa di antara berbagai dengan mengacu pada aturan-aturan serta standar internasional yang telah disetujui bersama (Chadziq, 2016). Semua negara di dunia termasuk yang sudah maju atau sedang berkembang, terlibat dalam aktivitas perdagangan internasional dengan melakukan ekspor dan impor.

Kesimpulannya perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang berbeda. Tujuan utama dari perdagangan ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran tersebut, yang dikenal sebagai gains off trade. Aktivitas perdagangan ini sangat penting dalam ekonomi global karena memungkinkan distribusi barang-produk dari satu negara ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai wilayah dunia. Perdagangan internasional juga mengacu pada aturan dan standar internasional yang telah disetujui bersama, dan sering dikenal sebagai ekspor dan impor.

Instrumen Perdagangan Internasional

Menurut Yolanda, (2016) terdapat beberapa instrumen perdagangan internasional meliputi:

1. Tarif: Meliputi tarif impor dan ekspor, yang merupakan pajak yang dikenakan atas barang yang diimpor atau diekspor dari atau ke negara tertentu (Diphayan, 2018).
2. Perjanjian Perdagangan Bilateral: Kesepakatan perdagangan antara dua negara yang mencakup preferensi perdagangan, akses pasar, penghapusan tarif, dan pengaturan perdagangan lainnya (Sanib, 2019).
3. Strategic Trading: Strategi perdagangan di mana negara-negara mencoba untuk memanfaatkan keunggulan mereka dalam perdagangan internasional dengan mengendalikan pasokan atau permintaan tertentu dalam pasar global (Diphayan, 2018).
4. Kuota: Pembatasan kuantitas impor barang atau jasa ke suatu negara dalam jangka waktu tertentu (Raytiaputri, 2016).
5. Subsidi: Bantuan keuangan atau insentif lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau industri dalam negeri untuk membantu mereka bersaing dalam pasar internasional (Munawar et al., 2013). Subsidi dapat berupa subsidi ekspor, subsidi produksi, atau subsidi lainnya.

World Trade Organization (WTO)

Pada tanggal 1 Januari 1995, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) didirikan dengan fokus utama pada penurunan tarif dan hambatan perdagangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi global guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. WTO berperan sebagai forum perundingan perdagangan bagi 164 negara anggota termasuk Indonesia, dan memiliki sistem penyelesaian sengketa yang merupakan kewajiban hukum.

Struktur WTO terdiri dari Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum serta beberapa lembaga lainnya seperti Badan Penyelesaian Sengketa dan Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan. Dengan menggunakan fungsinya tujuan WTO adalah meningkatkan kualitas hidup, menciptakan peluang kerja baru, menggalakkan pertumbuhan produksi dan perdagangan global serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam (Kurniawardhani, 2021). WTO sebagai penerus GATT yang didirikan pada tahun 1947, memiliki sejarah panjang dalam mengatur aturan perdagangan dunia dan berperan penting dalam menjaga sistem ekonomi internasional yang adil.

Profil Produk

1. Nikel:
 - a. Jenis Produk: Nikel merupakan salah satu jenis logam transisi yang umumnya dimanfaatkan dalam berbagai sektor industri, terutama sebagai bahan utama dalam produksi baja anti karat, pembuatan baterai, dan alat elektronik.
 - b. Karakteristik Produk: Nikel mempunyai ketahanan terhadap korosi dan oksidasi, serta konduktivitas yang baik dalam penggunaan elektronik.
 - c. Manfaat Produk dalam Perekonomian Indonesia: Nikel berperan penting dalam meningkatkan pendapatan negara sebagai salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja dengan mengolah nikel menjadi produk turunan seperti feronikel.
2. Minyak Kelapa Sawit:
 - a. Jenis Produk: Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang berasal dari ekstraksi buah kelapa sawit (*Elaeis guineensis*).
 - b. Karakteristik Produk: Minyak kelapa sawit kaya akan lemak jenuh, sehingga sangat sesuai untuk berbagai keperluan seperti pengolahan makanan, produksi kosmetik, dan sebagai bahan bakar bio.
 - c. Manfaat Produk dalam Perekonomian Indonesia: Komoditas ekspor terbesar Indonesia. Menghasilkan lapangan kerja, pendapatan petani, serta devisa melalui ekspor adalah bukti signifikan bahwa industri kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian Indonesia.
3. Baja:
 - a. Jenis Produk: Baja ialah campuran logam yang utamanya terdiri daripada besi dan karbon, bersama-sama dengan unsur-unsur lain termasuk nikel, krom, dan mangan.

- b. Karakteristik Produk: Baja memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi, ketahanan terhadap korosi yang luar biasa, serta kemampuan pengecoran yang tak tertandingi. Oleh karena itu, baja menjadi bahan utama dalam berbagai industri seperti konstruksi, otomotif, dan manufaktur.
- c. Manfaat Produk dalam Perekonomian Indonesia: Industri manufaktur Indonesia bergantung pada industri baja sebagai salah satu sektor utama. Membuat baja di dalam negeri berkontribusi dalam memenuhi permintaan lokal dan juga mendukung industri lain seperti konstruksi dan otomotif. Ekspor baja juga berperan penting dalam meningkatkan penerimaan devisa bagi negara.

Permasalahan Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa

Permasalahan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait ekspor nikel, minyak kelapa sawit, dan baja dapat bermula dari berbagai mekanisme. Salah satunya adalah pemberlakuan kebijakan baru oleh Uni Eropa yang dianggap membatasi atau merugikan ekspor komoditas tersebut dari Indonesia, seperti standar lingkungan atau kesehatan yang lebih ketat, pembatasan impor, atau pengenaan tarif yang lebih tinggi (Renal Anugrah Saputra et al., 2023). Mekanisme lain dapat berupa tuduhan pelanggaran aturan perdagangan internasional yang dilakukan oleh salah satu pihak, misalnya terkait subsidi atau praktik dumping. Perbedaan interpretasi terhadap aturan perdagangan bilateral atau multilateral juga dapat memicu perselisihan.

Mekanisme permasalahan ini dimulai sejak Uni Eropa menerapkan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang mengkategorikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas dengan risiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC). Selain itu, Uni Eropa juga menggugat Indonesia ke WTO terkait pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi industri hilirisasinya (Rahayu & Sugianto, 2020). Jika tidak ada penyelesaian, permasalahan dapat berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi, seperti penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam permasalahan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terhadap ekspor nikel, minyak kelapa sawit, dan baja adalah pemerintah Indonesia dan Uni Eropa sebagai pihak yang berperan dalam permasalahan perdagangan. Selain itu, perusahaan domestik Indonesia yang mengekspor barang-barang tersebut juga terlibat dalam permasalahan ini. Mereka harus menghadapi hambatan dan tarif yang dikenakan oleh Uni Eropa, yang dapat mempengaruhi harga pasar dan memperlambat inovasi. Konsumen di Uni Eropa yang membeli produk-produk tersebut juga terlibat, karena mereka harus menghadapi biaya yang lebih tinggi akibat hambatan dan tarif.

Di samping itu, WTO (World Trade Organization) memiliki peranan krusial dalam situasi ini. WTO menghadirkan wadah untuk menangani sengketa perdagangan antara negara-negara anggotanya melalui mekanisme penyelesaian yang terstruktur. Apabila terjadi ketidaksepakatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, pemangku kepentingan dapat mengajukan kasus mereka ke WTO. Sebagai contoh, jika Indonesia merasa bahwa tarif yang diterapkan oleh Uni Eropa tidak adil atau menghambat

perdagangan melalui regulasi yang memilih-milih, maka Indonesia memiliki opsi untuk membawa kasus ini ke WTO guna mencari penyelesaian yang adil sesuai dengan peraturan perdagangan global. Oleh karena itu, peran WTO adalah sebagai penghubung yang membantu memastikan bahwa perdagangan internasional berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disetujui oleh semua anggota.

Penyebab dan Dampak

Permasalahan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait ekspor nikel, minyak kelapa sawit, dan baja memiliki beberapa penyebab yang kompleks dan dampak yang signifikan. Salah satu penyebab utama adalah perselisihan kebijakan antara kedua pihak. Salah satu penyebab utama adalah perselisihan kebijakan antara kedua pihak terkait standar lingkungan dan proses produksi. Uni Eropa menerapkan standar lingkungan yang ketat terhadap produk impor, termasuk nikel, yang sering kali tidak sejalan dengan praktik industri di Indonesia (Ramadhana et al., 2024). Misalnya, minyak kelapa sawit sering menjadi target kampanye lingkungan di Eropa karena dianggap berkontribusi pada deforestasi dan perubahan iklim. Uni Eropa telah mengadopsi kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang mengurangi penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit karena dampak lingkungannya (Adirinarso, 2023). Hal ini menimbulkan ketegangan dengan Indonesia, yang merupakan produsen utama minyak kelapa sawit.

Selain itu, persaingan harga dan tuduhan dumping juga menjadi penyebab utama permasalahan perdagangan ini. Uni Eropa pernah menuduh Indonesia melakukan praktik dumping pada produk baja, yang berarti menjual produk baja di bawah harga pasar untuk menguasai pasar Uni Eropa. Tuduhan ini menyebabkan Uni Eropa memberlakukan bea masuk anti-dumping terhadap produk baja Indonesia. Hal ini tentu saja merugikan produsen baja Indonesia dan mengurangi daya saing produk mereka di pasar Eropa.

Dampak dari permasalahan perdagangan ini bagi Indonesia sangatlah signifikan. Penurunan ekspor adalah salah satu dampak langsung yang dirasakan. Misalnya, dengan adanya pembatasan dan regulasi ketat dari Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit, ekspor produk ini ke Uni Eropa menurun drastis (Harmat Tarigan & Budi Saputro, 2022). Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa menurun lebih dari 20% dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini mengakibatkan hilangnya pendapatan yang signifikan bagi negara dan produsen lokal.

Kerugian ekonomi juga dirasakan oleh para produsen dan pekerja di sektor-sektor yang terkena dampak. Misalnya, industri baja yang menghadapi bea masuk anti-dumping mengalami penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja. Hal ini menambah tekanan ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. Ketidakpastian investasi juga menjadi dampak lain yang dirasakan. Investor cenderung ragu untuk menanamkan modalnya di industri yang terkena dampak ketegangan perdagangan karena risiko yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia

Dalam menghadapi permasalahan perdagangan dengan Uni Eropa, pemerintah Indonesia telah mengadopsi beberapa kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Salah satu kebijakan utama adalah mendorong hilirisasi industri, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas mentah sebelum diekspor. Hilirisasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Untuk komoditas nikel, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah dan mendorong pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nikel diekspor dalam bentuk produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti feronikel atau stainless steel. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebijakan ini telah meningkatkan investasi di sektor smelter dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, produk nikel olahan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bijih nikel mentah, sehingga meningkatkan pendapatan ekspor Indonesia .

Untuk minyak kelapa sawit, pemerintah Indonesia juga mendorong hilirisasi dengan mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit menjadi produk turunannya, seperti biodiesel, oleokimia, dan produk makanan olahan. Kebijakan mandatori biodiesel (B30) adalah salah satu langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor (Evalia & Teapon, 2023). Kebijakan ini tidak hanya membantu menyerap produksi minyak kelapa sawit, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan energi nasional. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, produksi biodiesel Indonesia telah meningkat signifikan sejak penerapan kebijakan B30, dan sebagian besar produksi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri .

Untuk baja, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai insentif untuk menarik investasi dalam industri pengolahan baja. Kebijakan ini meliputi pemberian insentif fiskal, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pengembangan kawasan industri yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi baja dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, dengan meningkatkan produksi baja dalam negeri, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan industri domestik dan meningkatkan ekspor produk baja yang lebih bernilai tambah.

Alternatif Solusi

Beberapa alternatif solusi untuk mengurangi dampak negatif dan memperkuat posisi ekonomi:

1. Peningkatan Kualitas Produk

Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah meningkatkan kualitas produk ekspor agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Untuk minyak kelapa sawit, misalnya, Indonesia dapat meningkatkan praktik berkelanjutan dalam produksi kelapa sawit dan mendapatkan sertifikasi dari organisasi internasional seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

2. Kolaborasi dengan Pihak Swasta

Misalnya, asosiasi industri dan perusahaan eksportir dapat berpartisipasi dalam misi dagang dan pameran internasional untuk mempromosikan produk Indonesia.

3. Penguatan Kerjasama Regional

Melalui ASEAN, Indonesia dapat mendorong integrasi ekonomi regional yang lebih erat, termasuk harmonisasi standar produk dan penghapusan hambatan perdagangan intra-regional.

4. Inovasi dan Diversifikasi Produk

Pemerintah dapat mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif dan memiliki nilai tambah tinggi. Misalnya, dalam sektor kelapa sawit, selain memproduksi minyak kelapa sawit mentah, Indonesia dapat mengembangkan produk-produk turunan seperti bahan kosmetik, bahan pangan, dan bioenergi. Dalam sektor nikel, Indonesia dapat memproduksi baterai lithium untuk kendaraan listrik.

Kesimpulan

Perselisihan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait ekspor nikel, minyak kelapa sawit, dan baja memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Uni Eropa memberlakukan kebijakan lingkungan yang ketat dan tuduhan praktik dumping terhadap produk Indonesia, yang menyebabkan penurunan ekspor dan kerugian ekonomi bagi produsen domestik. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan strategis, seperti mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Alternatif solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kualitas produk, kolaborasi dengan pihak swasta, penguatan kerjasama regional, serta inovasi dan diversifikasi produk.

Daftar Pustaka

- Adirinarso, D. (2023). KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL YANG BERAKIBAT GUGATAN UNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION Erikson. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Chadziq, A. L. (2016). PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Studi Komparasi Perdagangan Internasional Konvensional dan Islam) Achmad. *AKADEMIKA*, 10(June).
- Diphayan, W. (2018). *Perdagangan internasional*. Deepublish.
- Evalia, N. A., & Teapon, R. R. H. (2023). Pengaruh Kebijakan Mandatori Biodiesel Terhadap Neraca Perdagangan dan Industri Minyak Goreng Sawit Indonesia. *Jurnal Agribisnis*, 25(2), 263–275.
- Harmat Tarigan, D., & Budi Saputro, P. (2022). Konflik Indonesia Dengan Uni Eropa (Ue) Dan Dampaknya Terhadap Posisi Keanggotaan Indonesia Di Paris Agreement. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 595–606. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.67>
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional : World Trade Organization (Wto). *Widya Winayata : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 49–53. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381>
- Munawar, D., Utama, W., & Cimahi, B. (2013). *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*. 22.

- Nuri Aslami, N. S. A. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 4(1), 14–23. <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i1.358>
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 224–236.
- Ramadhana, M. A., Maulana, M. S., Nugraha, Z. F., Subagja, R. E. G., & Wijaya, M. M. (2024). Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 185–199.
- Raytiaputri, R. (2016). *Perkecualian terhadap prinsip larangan pembatasan kuota impor terkait penanaman modal di indonesia*. 7(1), 98–111.
- Renal Anugrah Saputra, M., Mukhtar, M., Haikal Akbar, M., Fadia Putri, A.-Q., & Rahmawati Gustini, D. (2023). Sengketa Internasional Indonesia Vs Uni Eropa Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 507–514. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8316041>
- Sanib, S. S. (2019). Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas. *Halu Oleo Law Review*, 3(1), 50. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6016>
- Serlika Aprita, R. A. (2020). Hukum Perdagangan Internasional. In R. Mirsawati (Ed.), *RajaGrafindo Persada*. Rajawali Pers.
- Yolanda. (2016). Analisis Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 31–51.